

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para ilmuwan sosial sudah banyak melakukan penelitian terkait dengan penyandang disabilitas. Penelitian tersebut diantaranya adalah perspektif masyarakat tentang penyandang disabilitas, serta kemampuan aksesibilitas pelayanan umum bagi penyandang disabilitas dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun akses transportasi umum. Salah satu penelitian yang sudah ada berjudul Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Transportasi Umum di Kabupaten Sidoarjo memberikan hasil bahwa angkutan umum yang dikonstruksikan oleh penyandang disabilitas sebagai alat transportasi justru tidak membantu mereka untuk mobilisasi khususnya di kabupaten Sidoarjo. Penyandang disabilitas mengharapkan angkutan umum dapat menjadi alat transportasi yang dapat membantu para penyandang disabilitas dalam hal mobilisasi. Namun, bukannya angkutan umum menjadi sebuah alat penolong, justru mereka merasa angkutan umum ini menjadi transportasi yang sulit untuk mereka gunakan. Angkutan umum dalam penggunaannya dirasa belum begitu maksimal dalam melayani para penyandang disabilitas sebagai pemakai jasa ataupun juga yang dapat dikatakan sebagai penumpang angkutan umum (Rizki, 2014). Dari berbagai penelitian yang sudah ada tersebut, peneliti melihat bahwa permasalahan tentang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum banyak diteliti.

Tahun 2015, data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), menjelaskan bahwa terdapat 8,56 persen penyandang disabilitas dari jumlah total keseluruhan populasi penduduk di Indonesia. Jika ditampilkan dengan jumlah besaran penduduk adalah sekitar 22,5 juta orang. Tahun 2013, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja disebutkan

bahwa penyandang disabilitas yang menganggur sejumlah 23,9 persen dan di antaranya berstatus sebagai kepala rumah tangga.

Berdasarkan data dari ILO (*International Labour Organization*) dari seluruh negara di dunia ini penyandang disabilitas yang berada di negara-negara berkembang ada sampai 82 persen jumlahnya. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang berujung pada timbulnya masalah keterbatasan dalam mengakses berbagai fasilitas. Akses-akses tersebut seperti halnya akses kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Seringkali penyandang disabilitas terkucilkan dari aksesibilitas-aksesibilitas tersebut. Data Sakernas tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang. 51,18 persen dari jumlah tersebut adalah sebagai angkatan kerja yaitu sebanyak 11.224.673 orang. Sedangkan sisanya berjumlah 48,82 persen dengan banyak 10.705.856 orang merupakan bukan angkatan kerja. Besaran jumlah angkatan kerja sendiri yang telah dijelaskan sebelumnya terbagi lagi atas kelompok pekerja dan penganggur. Penyandang disabilitas yang bekerja sebesar 96,31 persen dan penganggur terbuka adalah sejumlah 3,69 persen.

Kompas tv pada tanggal 1 Agustus 2019 memuat berita tentang penyandang disabilitas yang dewasa ini masih saja dianggap tidak dapat berprestasi, serta dianggap tidak mampu untuk bekerja secara produktif, bahkan dicap sebagai beban dalam masyarakat. Hal ini membuat perjuangan hidup penyandang disabilitas kian berat. Penyandang disabilitas memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain karena kondisi mereka yang lebih sulit dibandingkan dengan non disabilitas untuk berpartisipasi di tengah masyarakat. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ada juga dijelaskan bahwa penyandang disabilitas seringkali menghadapi kesulitan dan hambatan. Hambatan yang dimaksud bisa berupa layanan umum yaitu misalnya layanan untuk bisa memperoleh pendidikan, layanan untuk dapat mengakses dalam bidang kesehatan, ruang publik serta juga termasuk dalam hal ketenagakerjaan. (kompas.tv, diakses pada 20 Oktober 2019)

Kecacatan yang dialami oleh para penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi halangan bagi mereka dalam usahanya memperoleh hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Putra, 2017). Pasal 28 A UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat ditawar. Ketika hak untuk hidup tidak dapat terpenuhi maka yang lain juga akan mengikuti untuk tidak dapat dipenuhi hak-hak asasinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) memiliki arti seseorang yang berada dalam keadaan sakit atau cedera sehingga kemampuan mereka menjadi terbatas. Baik kemampuan mental maupun fisik. Selain itu disabilitas juga memiliki artian bahwa seseorang dirasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal dengan cara yang biasa. Ada berbagai jenis ketidakmampuan mental dan atau fisik sehingga seseorang dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Ketidakmampuan tersebut meliputi tunadaksa, tunawicara, tunarungu yang biasanya juga seorang tunawicara, serta tunanetra yang dikategorikan secara fisik. Sedangkan tunagrahita, autisme, termasuk *down syndrome* merupakan ketidakmampuan secara mental. Namun adapula seorang penyandang disabilitas yang memiliki hambatan lebih dari satu jenis sehingga bisa dikatakan sebagai tunaganda (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI).

PBB menggunakan kata disabilitas sebagai istilah dalam konvensi internasional yang mengangkat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian Indonesia juga telah mengakui hasil konvensi tersebut dengan disahkannya Undang-Undang no. 19 tahun 2011. Hak yang mendasar adalah hak untuk hidup. Sedangkan hak-hak yang lain diantaranya adalah meliputi hak untuk dapat berpartisipasi dalam lingkungan publik maupun politik, bebas dari pelecehan dan kekerasan, hak

mendapatkan pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, mendapat pekerjaan dan masih banyak lagi. Kemudian dalam perumusan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 juga menggunakan istilah disabilitas. “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Merupakan isi dari Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Pekerjaan sendiri terbagi menjadi 2 sektor pekerjaan. Yaitu pertama adalah pekerjaan formal dan yang kedua adalah pekerjaan informal. Pekerjaan sektor formal atau yang biasa disebut dengan pekerjaan *white collar* merupakan sebuah pekerjaan yang terdiri dari beberapa diantaranya yaitu tenaga profesional. Misalnya seperti bidang jasa, tata usaha, kepemimpinan, tenaga ketatalaksanaan, tenaga usaha penjualan, teknisi dan sejenisnya. Dibutuhkan tingkat pendidikan yang cukup dan sesuai kualifikasi untuk seseorang dapat bekerja di sektor formal. Seseorang yang bekerja formal juga mendapat pajak serta digaji secara tetap (Handri, 2008).

Sedangkan, tenaga kerja untuk pekerjaan informal (*blue collar*) lebih tidak memiliki banyak kuaifikasi karena pekerjaan ini cenderung menggunakan ketrampilan. Untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan ini tidak menggunakan ijin tertentu, tidak ada kontrak, tidak ada proses melamar kerja, dan tidak ada berkas apapun yang harus dipenuhi. Biasanya tenaga kerja sektor informal merupakan seseorang yang diberdayakan menjadi pegawai yang bekerja untuk usaha milik sendiri atau menjadi buruh yang masih berjalan secara mikro. Mereka yang bekerja pada sektor informal adalah pekerja yang secara hukum tidak mendapat perlindungan dan tidak memiliki struktur organisasi sehingga tidak memiliki tingkat jabatan tertentu (Hesti, 2008). Adapun definisi lain dari pekerjaan informal adalah mereka yang tenaga kerjanya tidak memiliki status permanen dalam pekerjaannya serta tidak memiliki penghasilan tetap. Pekerja sektor informal beberapa diantaranya seperti pada sektor pertanian, perikanan, kehutanan, tenaga produksi, alat angkut, dan pekerja kasar.

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah dijamin dalam UU No. 19 Tahun 2011 dalam pasalnya yang ke 9. Baik kedisabilitas secara sensorik ataupun intelektual, kedisabilitas secara fisik maupun kedisabilitas secara mental. Partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan dapat meningkatkan kemandirian mereka sendiri sehingga pemenuhan hak aksesibilitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Kemudahan dalam memperoleh aksesibilitas juga merupakan jalan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kesamaan kesempatan yang dimaksud tersebut meliputi hak yang sama dalam mendapatkan akses pelayanan umum tidak terkecuali akses dalam mendapatkan pekerjaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konstruksi sosial sebagai dasar teori untuk menganalisis data. Adapun 3 tahapan dalam konstruksi sosial. Tahap pertama adalah eksternalisasi, tahap kedua objektivikasi, selanjutnya tahap ketiga internalisasi. Eksternalisasi sebagai tahap pertama adalah perwujudan proses manusia kepada lingkungannya dimana ia mencurahkan dirinya secara fisik ataupun juga melalui pemikiran. Manusia sudah secara otomatis akan cenderung melakukan pencurahan diri dimanapun ia berada karena hal tersebut menunjukkan manusia dan sifat dasar yang ia miliki.

Selanjutnya adalah tahap objektivikasi. Secara bahasa objektivasi memiliki arti bahwa suatu tindakan berasal dari luar diri manusia sehingga ketika mengambil keputusan dalam bertindak maka keputusan tersebut tidak dapat terpengaruh oleh pendapat secara pribadi karena hal-hal yang terjadi berasal dari luar kendali seorang individu (Poerwodarminta, 2008). Adanya pelembagaan ataupun legitimasi dapat melahirkan masyarakat secara obyektif (Berger, 1990). Manusia tidak memiliki dunia sendiri sehingga individu-individu tersebut harus membangun dunianya masing-masing. Membangun dunia sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya akan membentuk suatu lembaga atau institusionalisasi. Terbentuknya pelembagaan

ini karena manusia memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan ini dalam arti berbeda sifat dengan binatang. Suatu lembaga yang terbentuk itu adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu pola yang menjadi pembiasaan. Pola itu dapat terjadi kembali dimana saja dan kapan saja dengan cara yang sama di masa depan. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan terbentuk sebuah inovasi. Manusia mengembangkan dirinya melalui berbagai macam kegiatan berpola yang penuh variasi sehingga bukan hanya berdasarkan naluri tetapi lebih kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan tentunya terdapat berbagai macam tatanan sosial dan budaya. Maka dari itu, adanya orang-orang yang berpengaruh (*significant-others*) dapat menjadi perantara hubungan timbal-balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungannya dalam proses pengembangan diri.

Setelah itu individu melakukan internalisasi dengan arti lain menciptakan makna yang ia ketahui dari lingkungan sekitarnya atas pencerahan diri yang sudah ia lakukan. Proses peresapan kembali atau pemaknaan kembali atas realitas yang manusia ketahui dari lingkungan dimana ia berada kemudian mentransformasikannya serta menghayati dari pengetahuan objektif menjadi pengetahuan subjektif dengan kesadaran penuh merupakan proses yang dinamakan dengan internalisasi (Berger, 1994). Itu berarti bahwa manusia menganggap dirinya sudah menjadi sebuah bagian dari masyarakat adalah ketika ia memahami sesama. Tidak hanya itu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ia memaknai kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya. Adapun proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai taraf menjadi anggota sebuah masyarakat adalah dengan sosialisasi. Dalam sosialisasi juga terdapat adaptasi dimana seseorang berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dalam beradaptasi tentunya ditemukan berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing individu. Terdapat dua macam sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Yang dialami individu ketika masa anak-anak sehingga menjadi proses belajarnya dalam bertumbuh dan berkembang dinamakan

sosialisasi primer. Sedangkan untuk sosialisasi sekunder merupakan tahap lanjutan dari sosialisasi primer yaitu ketika individu bertemu dalam dunia-dunia baru di dalam masyarakat yang terjadi secara objektif.

Berdasarkan penjelasan terkait penyandang disabilitas serta pengertian tentang pekerjaan formal maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang merujuk pada tahapan konstruksi sosial yang sudah dipaparkan sebelumnya, dengan judul: **“Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas tentang Akses Pekerjaan Formal di Kota Surabaya”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang ingin diangkat serta akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan dengan latar belakang tersebut adalah :

“Bagaimana konstruksi sosial penyandang disabilitas tentang akses pekerjaan formal di Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konstruksi sosial yang terbentuk oleh penyandang disabilitas tentang akses pekerjaan formal di Kota Surabaya. Konstruksi sosial yang dimaksud melalui 3 proses tahapan yaitu:

1. Eksternalisasi

Sebagai bentuk pencurahan diri manusia baik dalam aktivitas fisik maupun pikiran. Bagaimana penyandang disabilitas memandang dan berusaha untuk mendapatkan akses pekerjaan formal.

2. Objektivikasi

Kesadaran yang dirasakan oleh penyandang disabilitas akan fenomena yang terjadi secara berulang-ulang.

3. Internalisasi

Pengidentifikasian diri serta pemaknaan yang terbentuk oleh penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk menambah pengetahuan serta membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai akses pekerjaan formal di Kota Surabaya melalui konstruksi sosial penyandang disabilitas dan kaitannya dengan kesamaan hak penyandang disabilitas. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan penjelasan ataupun gambaran yang ada dalam realitas tentang keterbukaan akses pekerjaan formal yang layak bagi penyandang disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi:

a. Pemerintah

Agar supaya pihak pemerintahan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat serta masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan pegawai lebih dapat membuka peluang serta hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam pekerjaan formal dapat lebih menjadi perhatian.

b. Penyandang Disabilitas

Dapat lebih menghayati serta memaknai dirinya dalam usahanya mendapatkan akses pekerjaan formal yang sama dan

layak dengan pekerja non disabilitas sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka masing-masing.

c. Penulis sendiri

Penulis dapat memperbaharui dan melengkapi hasil penelitian sebelumnya tentang aksesibilitas hak-hak penyandang disabilitas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Studi Terdahulu

Telah banyak penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penyandang disabilitas. Sehingga berdasar hasil penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, peneliti menjadikannya sebagai sumber pustaka untuk melihat serta mencari celah dimana peneliti dapat mengembangkan penelitian tersebut. Peneliti juga mengidentifikasi kelebihan serta kekurangan penelitian sebelumnya serta apa yang membedakan studi-studi terdahulu dengan topik yang peneliti angkat. Tidak hanya itu, sumber-sumber lain juga digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sudah ada berkaitan dengan teori-teori yang juga bersinggungan dengan topik yang diangkat. Sumber-sumber tersebut bisa berasal dari jurnal, skripsi, buku ilmiah maupun artikel.

Pertama, Jurnal berjudul *Positive Meaning: The Typical Coping of Resilient Person Towards Changing Conditions Become Individual with Disability*. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif. Partisipan penelitian adalah empat dari delapan individu penyandang cacat yang juga berpartisipasi dalam penelitian sebelumnya (Hendriani et.al, 2011). Peneliti menggunakan wawancara mendalam sebagai cara untuk mengumpulkan data, dan menganalisisnya dengan teknik analisis fenomenologis interpretatif. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap subyek penelitian memiliki tanggapan positif akan kondisi mereka yang mengalami kecacatan. Makna positif yang mereka miliki tersebut memungkinkan individu untuk

dapat bangkit dari tekanan yang diperoleh secara psikologis, menerima keadaan mereka sebagai penyandang disabilitas dan bersedia untuk diberdayakan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan topik yang saya angkat adalah, penelitian ini lebih memfokuskan dari segi psikologis subyek penelitian. Peneliti tidak memperhatikan hal-hal yang berada dari luar diri subyek penelitian.

Kedua, Jurnal berjudul *Increasing Social Skills Competencies to Prepare for Careers of Children with Special Needs*. Penelitian ini dilakukan di 3 sekolah Luar Biasa. Sekolah-sekolah tersebut adalah SLBN Colomadu, SLBN Surakarta dan SLBN Sukoharjo. Penelitian ini berfokus pada pentingnya peningkatan kemampuan maupun kompetensi bagi kemajuan karir dalam dunia pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia perlu untuk ditingkatkan tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis secara deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dipahami bahwa ketiga sekolah luar biasa tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan dan bakat kemampuan sosial bagi murid-muridnya. Dimulai dari yang sederhana seperti sikap meningkatkan kepercayaan diri melalui partisipasi langsung dengan lingkungan. Misalnya pergi ke pasar atau ke tempat umum lainnya. Selain itu juga sekolah mengadakan ada program magang kerja. Namun ada beberapa hambatan yang ditemui dalam proses peningkatan sumber daya tersebut. Diantaranya adalah kurangnya dukungan dari orangtua murid serta lingkungan yang belum terbuka dengan kehadiran anak-anak berkebutuhan khusus ini. Beda dari penelitian ini dengan dengan topik yang saya angkat adalah, penelitian ini berada pada waktu dimana anak-anak disabilitas yang masih dinaungi oleh lembaga sekolah dan dipersiapkan untuki menghadapi dunia pekerjaan. Sedangkan topik yang saya teliti berbicara tentang akses pekerjaan formal yang sesungguhnya dihadapi oleh para penyandang disabilitas.

Ketiga, Jurnal berjudul *Inclusive Education: in Concepts, Policies, and Implementation*. Jurnal penelitian ini berfokus pada penerapan pendidikan inklusif

sebagaimana seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang negara tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan inklusif dapat dipahami ketika tidak ada perbedaan diantara murid yang berkekurangan dengan murid yang normal. Murid dengan kekurangan baik fisik maupun mental namun memiliki potensi kecerdasanyang dapat dikembangkan diberikan kesempatan yang sama untuk bisa belajar selayaknya murid normal pada umumnya. Sehingga pendidikan yang terselenggara ini tidak membedakan anak-anak dengan kebutuhan khusus ataupun dalam aspek lainnya seperti status sosial, status ekonomi, ras sekalipun jenis kelamin.. Pendidikan inklusif hadir dan dilatarbelakangi oleh pandangan masyarakat yang telah mengalami perubahan seiring perkembangan zaman tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Adalah sebuah inovasi bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam berkembangnya dunia pendidikan yaitu melalui pendidikan inklusif. Namun implementasi yang sudah berlangsung adapula permasalahan yang dihadapi yaitu terkait tataran operasional sekolah. Banyak konsep-konsep mendasar tentang pendidikan inklusif yang belum dapat terlaksana dengan baik walaupun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan dirinya sebagai sekolah inklusif. Pendidikan inklusif yang dilaksanakan masih jauh dari apa yang diharapkan serta masih terkendala tentang akses dan kualitas pendidikan itu sendiri. Akses yang dimaksud meliputi media belajar, infrastruktur dan berbagai fasilitas sekolah yang kurang memadai. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Kajian pustaka dan empiris menjadi dasar pendekatan. Penelitian ini memberikan hasil bahwa implementasi pendidikan inklusif di sekolah Lazuardi Kamila Surakarta sudah berfungsi maksimal. Dapat dilihat dari komponen-komponen sistem di sekolah tersebut sudah memiliki peranan yang jelas. Sehingga dalam pengimplementasian kebijakan inklusif, implementor telah mampu untuk mencapai sasaran. Perbedaan jurnal penelitian ini dengan topik yang penulis ambil adalah terletak pada bidang kesetaraannya. Penelitian ini berfokus pada bidang pendidikan, sedangkan penulis berfokus pada bidang pekerjaan khususnya pekerjaan formal.

Keempat, Jurnal berjudul *Implementation of Devotional Rights on Accessibility and Communication Based on Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Concerning Disabilities*. Penelitian ini fokus terhadap kebutuhan mendasar orang tuli dalam berkomunikasi. Komunikasi tersebut mencakup bahasa isyarat dan tayangan teks yang dapat membantu orang tuli misalnya dalam hal bekerja maupun sekedar di tempat umum. Sebagai contoh pada saat di terminal atau bandara, jika seluruh informasi disampaikan hanya melalui pengeras suara maka hal ini akan menyulitkan bagi orang-orang tuli. Peneliti dalam jurnal ini menyoroti dua hal yaitu aksesibilitas dan hak orang tuli untuk berkomunikasi. Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subyek penelitian penyandang tunarungu. Berdasarkan hasil yang dipaparkan dapat dipahami bahwa aksesibilitas orang tuli dalam berkomunikasi belum diimplementasikan secara sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang. Tentunya yang menjelaskan tentang disabilitas. Pemenuhan hak-hak orang tuli masih dilaksanakan secara bertahap sehingga sudah ada upaya dalam memenuhi hak tersebut. Penelitian yang dilakukan berfokus terhadap hak penyandang disabilitas khususnya tunarungu. Sedangkan penelitian skripsi yang penulis angkat lebih berfokus pada akses seluruh jenis disabilitas fisik terhadap pekerjaan formal tepatnya di Kota Surabaya.

Kelima, Jurnal berjudul *E-Government Accessibility for Disability Persons*. Penelitian ini berfokus pada permasalahan informasi dan pelayanan melalui e-government sebagai upaya meningkatkan efektivitas dalam upaya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Bentuk penerapan e-government adalah dengan dibuatnya website pemerintah salah satunya. Sehingga segala informasi yang berkaitan dengan pemerintahan dapat diakses hanya melalui internet. Adapun pedoman yang dinamakan sebagai Web Content Accessibility Guidelines Working Group (WCAG) untuk membuat konten web lebih ramah bagi para penyandang disabilitas. Namun pada faktanya, masih banyak negara yang belum memiliki e-

government ini. Penulisan jurnal artikel ini menggunakan metode *systematic literature review*. Hasil dari penulisan artikel ini menunjukkan pentingnya pengadaan e-government dalam memberikan informasi yang dapat secara mudah diakses oleh semua kalangan. Banyak negara berkembang yang belum memiliki e-government seperti yang sudah dimiliki oleh negara maju. Hal ini disebabkan oleh kebijakan tentang penyandang disabilitas di negara maju lebih kuat daripada di negara berkembang. Selain itu, kesadaran pemerintah dan masyarakat akan aksesibilitas juga perlu untuk ditingkatkan.

Keenam, Jurnal berjudul Konstruksi Sosial Penyandang Disabilitas terhadap Penggunaan Angkutan Umum di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan karena banyaknya penyandang disabilitas yang kini beralih menggunakan sepeda motor pribadi dibanding dengan menggunakan angkutan umum untuk melakukan mobilitasi dalam kesehariannya. Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan teknik analisis sesuai dengan teori konstruksi sosial yang dilakukan mulai dari tahap eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah para penyandang disabilitas lebih memilih untuk meninggalkan angkutan umum dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Pelayanan angkutan umum yang dirasa masih kurang maksimal dan tidak cukup ramah untuk para penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan topik yang peneliti angkat adalah aksesibilitas studi terdahulu ini berkaitan dengan transportasi umum, sedangkan yang peneliti angkat berkaitan dengan akses pekerjaan.

Ketujuh, Jurnal peneliti yang dilakukan oleh LSM Yogyakarta dengan topik berkaitan tentang penyandang disabilitas dan pemenuhan aksesibilitasnya. Penelitian ini secara kualitatif memaparkan tentang pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna menjamin kemandirian dan partisipasi dalam hidup bermasyarakat. Aksesibilitas dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik meliputi bangunan gedung, lingkungan juga ruang publik. Sedangkan aksesibilitas non fisik meliputi informasi komunikasi dan

teknologi. Penelitian ini memberikan hasil bahwa pemenuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta ternyata belum mencapai usaha maksimal. Artinya seringkali masih terjadi diskriminasi pelayanan di berbagai tempat, baik dalam aksesibilitas yang bersifat fisik maupun non fisik. Pemerintah terkesan tidak ada kemauan untuk memperbaiki fasilitas publik yang tidak bisa diakses oleh para penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih menekankan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam fasilitas publik.

Kedelapan, Jurnal berjudul Keterbatasan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Kaum Disabilitas. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan standar kesehatan yang sama dengan non disabilitas. Tanpa mendapat perlakuan diskriminasi melainkan dapat secara maksimal memperolehnya. Seperti halnya yang sudah diatur dalam CRPD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, alasan penyandang disabilitas tidak menerima pelayanan medis yang diperlukan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: ketersediaan, penerimaan dan aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan faktor yang berada di luar subyek penelitian, sehingga berkaitan erat dengan lingkungan. Sebaliknya faktor ketersediaan dan penerimaan berasal dari dalam subyek penelitian, sehingga merupakan faktor masing-masing individu. Penelitian ini menekankan dalam perolehan akses kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Kesembilan, Jurnal dengan topik utama tentang penyandang disabilitas dalam megakses fasilitas publik di Kota Surakarta. Penelitian ini berfokus pada penyandang disabilitas dalam aksesnya menggunakan fasilitas publik. Dalam pelaksanaannya terhadap sisi keberhasilan namun juga terdapat sisi kegagalan. Komitmen yang ditunjukkan untuk dapat lebih memperhatikan penyandang disabilitas adalah dengan terwujudnya peraturan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surakarta. Adanya peraturan daerah ini memperjelas serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Akan tetapi ada beberapa bagian yang masih dianggap belum berhasil. Sehingga dibutuhkan pengoptimalan secara lebih. Misalnya pada halte yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa ramah bagi disabilitas ternyata terdapat jarak yang

cukup jauh antara pijakan bus dan pinggiran halte sehingga mereka masih kesulitan untuk melangkah sendiri. Selain itu juga jalur yang terlalu curam di terminal dan ukuran toilet yang terlalu sempit bagi pengguna kursi roda. Sehingga melalui hasil penelitian dapat dipahami bahwa niat yang sudah baik dari pemerintah untuk membangun segala fasilitas umum bagi penyandang disabilitas masih belum tepat. Membuat penyandang disabilitas masih kesulitan dalam mengaksesnya. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang membuat fasilitas-fasilitas tersebut masih kurang mengetahui dengan pasti bagaimana yang sebenarnya dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam setiap pergerakannya. Diperlukan pembaharuan dan evaluasi-evaluasi yang lebih lanjut. Beda penelitian ini dengan topik penelitian skripsi yang diangkat adalah penelitian ini lebih berfokus pada akses fasilitas umum sedangkan permasalahan skripsi fokus kepada akses pekerjaan.

Kesepuluh, Jurnal berjudul Makna Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Yayasan Bina Karya "*Tiara Handy Craft*" Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang makna kerja khususnya bagi para penyandang disabilitas di yayayasan bina karya "*tiara handycraft*" Surabaya. Selama ini penyandang disabilitas masih sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred schutz. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hirearkhi kebutuhan Abraham Maslow. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa makna kerja bagi penyandang disabilitas di Yayasan Bina Karya Tiara Handycraft diantaranya adalah bekerja sebagai bentuk eksistensi diri, sebagai bentuk usaha untuk mengumpulkan modal, sebagai upaya adaptasi mereka dengan lingkungan sosial, menambah penghasilan keluarga, dan sebagai sumber penghasilan utama keluarga. Penelitian ini merupakan makna pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor informal. Sedangkan topik yang peneliti angkat adalah berkaitan dengan pekerjaan formal.

1.5.2 Kerangka Teori

1.5.2.1 Teori Konstruksi Sosial (*social construction*) Peter L. Berger dan Lukmann

Teori ini mencoba menjelaskan bahwa kenyataan dan pengetahuan merupakan dua buah kunci. Dimana kenyataan yang terjadi merupakan hasil dari kenyataan yang terbentuk secara sosial. Suatu kenyataan yang terjadi dalam hidup sehari-hari merupakan kumpulan fenomena-fenomena yang terjadi dari luar diri manusia sehingga tidak bergantung pada kehendak seorang individu. Sedangkan pengetahuan berperan sebagai sumber ilmu untuk memahami bahwa kenyataan memiliki karakteristik tertentu dan fenomena-fenomea yang terjadi di dalamnya adalah suatu hal yang nyata (Berger, 1990).

Manusia memiliki dunianya yang dimana dunia tersebut dibentuk oleh individu itu sendiri berdasarkan aktivitas-aktivitasnya yang berhubungan dengan sekitarnya melalui proses konstruksi sosial. Adapun 3 tahapan dalam konstruksi sosial. Tahap pertama adalah eksternalisasi, tahap kedua objektivikasi, selanjutnya tahap ketiga internalisasi. Eksternalisasi sebagai tahap pertama adalah perwujudan proses manusia kepada lingkungannya dimana ia mencurahkan dirinya secara fisik ataupun juga melalui pemikiran. Pada saat manusia mencurahkan dirinya kepada kehidupan di sekitarnya maka akan terbentuk suatu aktivitas-aktivitas tertentu sebagai perwujudan pencurahan diri. Manusia sudah secara otomatis akan cenderung melakukan pencurahan diri dimanapun ia berada karena hal tersebut menunjukkan manusia dan sifat dasar yang ia miliki. Mengalami pertumbuhan kepribadian yang dipengaruhi oleh budaya juga merupakan sifat dari manusia (Berger, 1994).

Selanjutnya adalah tahap objektivikasi. Secara bahasa objektivasi memiliki arti bahwa suatu tindakan berasal dari luar diri manusia sehingga ketika mengambil keputusan dalam bertindak maka keputusan tersebut tidak dapat terpengaruh oleh pendapat secara pribadi karena ha-hal yang terjadi berasal dari luar kendali seorang individu (Poerwodarminta, 2008). Adanya pelembagaan ataupun legitimasi dapat

melahirkan masyarakat secara obyektif (Berger, 1990). Manusia tidak memiliki dunia sendiri sehingga individu-individu tersebut harus membangun dunianya masing-masing. Membangun dunia sendiri melalui aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya akan membentuk suatu lembaga atau institusionalisasi. Terbentuknya pelembagaan ini karena manusia memiliki kekhasannya sendiri. Kekhasan ini dalam arti berbeda sifat dengan binatang. Suatu lembaga yang terbentuk itu adalah hasil dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu pola yang menjadi pembiasaan. Pola itu dapat terjadi kembali dimana saja dan kapan saja dengan cara yang sama di masa depan. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan terbentuk sebuah inovasi. Manusia mengembangkan dirinya melalui berbagai macam kegiatan berpola yang penuh variasi sehingga bukan hanya berdasarkan naluri tetapi lebih kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Di dalam lingkungan tentunya terdapat berbagai macam tatanan sosial dan budaya. Maka dari itu, adanya orang-orang yang berpengaruh (*significant-others*) dapat menjadi perantara hubungan timbal-balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungannya dalam proses pengembangan diri.

Kenyataan yang terjadi sehari-hari merupakan suatu fenomena yang memiliki pola tertentu dan tidak memiliki keterkaitan yang pasti dengan pemahaman seorang individu. Sehingga kenyataan tersebut seringkali sudah tertata dan memiliki pola tersendiri sejak awal dan terlihat sebagai sesuatu yang tertib. Dalam melihat kenyataan sehari-hari itu seseorang memiliki kesadaran. Kesadaran itu terjadi dari luar individu, sehingga kesadaran tersebut sifatnya adalah obyektif. Kesadaran tersebut akan lingkungan sekitarnya yang terjadi sehari-hari kemudian dipersepsikan secara subjektif yang kemudian menghasilkan suatu makna yang terjadi dalam proses internalisasi (Berger, 1994).

Internalisasi dapat juga dipahami sebagai pemaknaan yang dilakukan oleh seorang individu berdasarkan penafsiran dan pengertiannya secara langsung atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dalam proses internalisasi seorang

individu telah mengidentifikasi serta memaknai dirinya sebagai anggota dari lembaga sosial dimana ia terlibat di dalamnya. Itu berarti bahwa manusia menganggap dirinya sudah menjadi sebuah bagian dari masyarakat adalah ketika ia memahami sesama. Tidak hanya itu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ia memaknai kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya. Tahap internalisasi telah berlangsung secara sempurna ketika individu dapat menghayati serta mentransformasikan dari apa yang ia lihat secara obyektif dari lingkungan dunia sekitarnya menjadi kesadaran yang ia bangun secara subyektif (Berger, 1994).

1.5.2.2 Teori Tindakan Sosial Max Weber

Suatu tindakan individu dimana tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain menurut Max Weber dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Disebut sebagai tindakan sosial karena tindakan itu memang ditujukan untuk orang lain dan bukan untuk benda mati. Sehingga jika tindakan yang dilakukan itu bukanlah tindakan yang mengarah ke orang lain melainkan kepada benda mati maka hal tersebut bukanlah merupakan tindakan sosial (Ritzer, 2000).

Dikatakan oleh Max Weber bahwa bagian dari masyarakat yaitu manusia secara individu adalah seseorang yang memiliki banyak ide. Sehingga tindakan manusia tidak selalu mengandung keselarasan dengan nilai, kebiasaan ataupun norma yang ada di masyarakat. Hal itu disebabkan adanya perilaku kreatif dari individu. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pranata sosial dan struktur sosial memang nyata adanya dalam masyarakat. Max weber berpendapat bahwa tindakan sosial dapat terbentuk karena adanya dua konsep tersebut. konsep yang dimaksud tidak lain adalah pranata sosial dan struktur sosial (Wirawan, 2012).

Weber membedakan tindakan sosial ke dalam empat tipe yaitu:

1. Tindakan rasionalitas instrumental (berorientasi tujuan)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sikap rasional guna mencapai tujuannya. Dapat juga dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan secara sadar sebagai cara untuk pemenuhan tujuan. Misalnya seseorang makan karena merasa lapar.

2. Tindakan rasional nilai (berorientasi nilai/berdasarkan nilai)

Tindakan rasional nilai lebih kepada tindakan yang didasari atas pertimbangan manfaat yang diperoleh tanpa terlalu mikirkan tujuannya. Tindakan ini merupakan tindakan yang dinilai baik dan benar dalam masyarakat. Pertimbangan baik secara etis, maupun bersifat religius merupakan dasar tindakan ini dibentuk.

3. Tindakan afektif / Tindakan yang dipengaruhi emosi

Tipe tindakan sosial ini merupakan tindakan yang tanpa melibatkan sisi intelektual. Namun tindakan ini lebih didominasi oleh perasaan atau emosi. Tindakan afektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu.

4. Tindakan tradisional / Tindakan karena kebiasaan

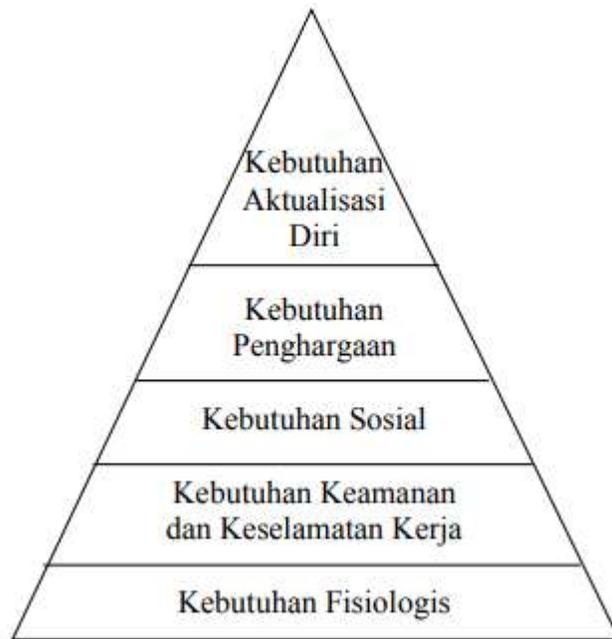
Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain. Perilaku tersebut merupakan tindakan yang ditunjukkan tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang.

1.5.2.3 Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

Kemudian untuk mendukung teori konstruksi sosial dan teori tindakan sosial, peneliti juga menggunakan teori Hirarki Kebutuhan oleh Abraham Maslow. Inti dari teori hirarki kebutuhan oleh Abraham Maslow adalah bahwa kebutuhan manusia tersusun dari suatu susunan atau tingkatan yang membentuk hirarki. Tingkat kebutuhan menurut Maslow dari yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri.

Robbins and Judge (2008) digambarkan dalam suatu hirarki lima kebutuhan dasar manusia menurut Maslow, yaitu:

1. Kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*), meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya.
2. Kebutuhan keamanan dan keselamatan kerja (*Security or safety needs*), meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional.
3. Kebutuhan sosial (*Affiliation or acceptance needs*), meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan.
4. Kebutuhan penghargaan (*Esteem needs*), meliputi penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi dan pencapaiannya serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan perhatian.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*Needs for self actualization*), dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri.



Gambar 1.1 Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok (fisiologis) sebelum mengarahkan perilaku kearah kebutuhan yang paling tinggi (*self actualization*). Akan semakin kuat motivasi orang tersebut menggunakan perilaku yang mengarah pada pemuasan kebutuhannya apabila kebutuhannya juga semakin kuat. Teori hirarki kebutuhan dari Maslow ini dapat dengan mudah dipahami dalam kerangka teoritis maupun terapan sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar. Teori Maslow merupakan penjelasan mutlak tentang semua perilaku manusia, tetapi lebih merupakan suatu pedoman umum bagi manajer untuk memahami orang-orang berperilaku. (Stephen, 2008).

1.5.2.4 Konsep Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja ataupun yang bisa disebut juga dengan tenaga kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dalam pasal 1, juga dituliskan

bahwa tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulyadi (2014) juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Menurut Murti (2014) tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

1.6 Metode dan Prosedur Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh tentang konstruksi sosial yang terbentuk oleh penyandang disabilitas tentang akses pekerjaan formal di Kota Surabaya. Agar dapat mendeskripsikan secara lengkap, mendalam, dan utuh maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data, menemukan gambaran fakta-fakta pada saat pelaksanaan sampai dengan analisis data. Metode ini memusatkan pada pemecahan masalah dan hal yang bersifat aktual. Data yang dikumpulkan akan disusun, kemudian dijelaskan sampai akhirnya dianalisis. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan tentang situasi atau proses yang berlangsung, bersifat alami yang merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat.

1.6.2 Konsep Sentral dan Isu-isu Sosial

Proses Konstruksi adalah ketika seseorang memaknai sesuatu yang terjadi dari realitas yang ada di sekitarnya. Jenis disabilitas ada berbagai macam. Mulai dari disabilitas fisik, mental atau bahkan keduanya. Seseorang yang mengalami kedisabilitas lebih dari satu macam dapat juga disebut sebagai tuna ganda. Penyandang disabilitas dalam kondisinya yang berkekurangan membuat mereka kesulitan dalam menyesuaikan dirinya atau bahkan berpartisipasi dengan keadaan dunia di lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam beraktivitas, para penyandang disabilitas ini memerlukan orang lain sebagai sumber bantuan bahkan dukungan bagi dirinya. Berbagai hambatan mereka temui pada saat mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk juga saat mengakses berbagai fasilitas. Fasilitas yang dimaksud itu merupakan fasilitas umum yang diantaranya meliputi bidang kesehatan, bidang pelayanan dalam dunia pendidikan, tidak terlupe juga dalam urusan pekerjaan. Seringkali para penyandang disabilitas ini masih dianggap sebelah mata oleh lingkungan karena dianggap tidak mampu dalam melakukan berbagai hal. Sedangkan di dalam UUD 1945 serta UU tentang ketenagakerjaan khususnya, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akses dan fasilitas publik yang salah satu diantaranya adalah akses pekerjaan formal sama seperti mereka yang non disabilitas.

1.6.3 Setting Sosial

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surabaya. Alasan penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya adalah karena Kota Surabaya dikenal sebagai Kota ramah penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan perbaikan dan pembangunan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di berbagai sudut kota sudah dilengkapi fasilitas untuk kenyamanan penyandang disabilitas diantaranya adalah tangga tak berundak, lift penyeberangan, pedestrian, bus suroboyo, dan berbagai fasilitas bagi penyandang disabilitas di dalam mall. Berkaitan dengan topik penelitian tentang akses pekerjaan formal, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana para penyandang disabilitas di kota Surabaya merasakan keterbukaan akses bagi mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan formal. Pekerja dalam pekerjaan formal secara garis besar dapat dikatakan adalah pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan ataupun lembaga baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Dimana perusahaan atau lembaga tersebut mempunyai struktur organisasi perusahaan.

1.6.4 Penentuan informan

Subyek penelitian ini dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria-kriteria yang memenuhi syarat. Tentunya yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Subyek-subyek diluar itu yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan tersebut tidak diambil sebagai informan. Informan ini dibutuhkan untuk mengetahui dan memahami konstruksi sosial penyandang disabilitas tentang akses pekerjaan formal di Kota Surabaya.

Adapun beberapa kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informan yang sesuai adalah dengan kriteria dibawah ini:

1. Seorang penyandang disabilitas penduduk usia kerja (15 tahun keatas)
2. Memiliki tingkat pendidikan akhir minimal SMA/SMK
3. Merupakan seorang *Job Holder*
4. Mempunyai waktu untuk diwawancarai dan dimintai informasi.

Tabel 1.1

Tabel Daftar Informan

No.	Nama	Usia (Th)	Jenis Kelamin (L/P)	Jenis Disabilitas	Pekerjaan
1.	TS	39	L	Tunanetra	Guru SMPLB
2.	AG	45	L	Tunanetra	Guru SMPLB
3.	DN	34	L	Tunanetra	Wiraswasta
4.	TD	50	L	Tunarungu	Karyawan Pabrik
5.	MG (non subyek)	50	L	Non disabilitas	Wakil Pengawas Pabrik
6.	AD	20	L	Tunanetra	Pegawai Dinas Sosial
7.	SN	41	L	Tunadaksa	Staf Notaris
8.	AS	40	P	Tunadaksa	Operator Telepon
9.	YK	45	L	Tunadaksa	Guru YPAC

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dalam dua jenis data. Masing-masing meliputi data primer dan data sekunder. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut:

1. Data primer

Merupakan data yang mengandung kata maupun tindakan yang ditunjukkan oleh informan pada saat wawancara dan menjadi sebuah tindakan yang diamati oleh peneliti. Data ini didapatkan melalui hasil rekaman suara atau juga dapat melalui catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti. Untuk mendapatkan data primer maka yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Cara pengumpulan data atau informasi dengan bertatap muka secara langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam merupakan penjelasan dari *indepth interview*. Proses berlangsungnya wawancara ini dilakukan secara intensif di setiap pertemuannya sehingga data yang didapat adalah data yang kuat. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpul data yang kemudian akan disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang didapat dari sumber lain selain informan serta sumber tertulis yang menjadi sumber data penguat bagi peneliti sehingga dapat juga dinamakan sebagai data tambahan. Data tertulis ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Diantaranya yaitu buku, sumber arsip, dokumen resmi, majalah, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu hingga dokumen pribadi.

1.6.6 Metode Analisis Data

Dalam tahap menganalisis data ada tiga alur kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Tiga alur itu pertama adalah reduksi data. Setelah peneliti melakukan reduksi data maka peneliti melakukan penyajian data. Setelah itu barulah peneliti melakukan alur terakhir yaitu kesimpulan atau

verifikasi (Moleong, 2004). Tiga alur kegiatan analisis data kualitatif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Pertama tentunya peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data terlebih dahulu yang sudah dilakukan melalui wawancara mendalam ataupun dari sumber data tambahan secara tertulis. Selanjutnya peneliti memilih dan memilah data mana saja yang akan dibahas dan dikaji lebih dalam. Peneliti menuangkan serta mentransformasikan data yang diperoleh dari lapangan, mana yang perlu diambil dan menjadi fokus perhatian untuk dikembangkan lebih lagi.

2) Penyajian Data

Peneliti tidak terpaku pada satu jenis data saja melainkan menguasai berbagai macam data yang diperoleh. Sekumpulan data informasi itu akan disajikan oleh peneliti dengan mengklarifikasi terlebih dahulu dengan melakukan pengecekan ulang dari berbagai sumber. Sehingga data yang disajikan merupakan data yang akurat yang diperoleh berdasarkan hasil data di lapangan serta penelusuran lebih lanjut melalui sumber tambahan.

3) Verifikasi / penarikan kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan oleh peneliti, selanjutnya peneliti akan menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat ini merupakan hasil dari makna-makna yang terbentuk dari berbagai data yang sudah disajikan sebelumnya. Melalui kesimpulan ini maka sebuah penelitian sudah menjawab permasalahan penelitian yang diangkat serta kegunaan dan kebenaran dalam penelitian ini dapat diungkap sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai.